

Forum Freedom, 7 Mei 2007

Tema : Globalisasi dan Buruh

Narasumber : Ari Perdana

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Bung Ari Perdana (Ape). Dia ini adalah peneliti ekonomi di CSIS, sebuah lembaga *think tank* yang berwibawa. Kita akan bicara dengan tema Globalisasi dan Buruh.

Bung Ape, tema globalisasi ini selalu memikat, ya. Saya tahu anda sering membicarakan tema globalisasi ini di berbagai forum, namun saya kira aspek yang akan kita bicarakan ini tidak terlalu sering disinggung, yakni tentang Buruh.

Globalisasi adalah suatu proses yang terus membesar sejak tahun 1960-an. Banyak yang mengatakan bahwa proses ini tidak bisa dihentikan. Banyak hal bermanfaat yang dapat kita ambil dari proses ini.

Namun para pengkritiknya mengatakan bahwa mungkin globalisasi tidak dapat dihentikan, namun ia tidak diinginkan karena banyak sekali dampaknya. Misalnya mendorong Amerikanisasi, meruntuhkan demokrasi, menindas hak-hak kaum pekerja, dsb.

Nah, bagaimana sebenarnya kaitan globalisasi ini dan kaum buruh secara umum.

Ape:

Kalau kita bicara globalisasi, ini kan dalam konteks ekonomi. Kita bisa melihat globalisasi ini sebagai mobilitas sumber daya. Kita bisa mendefinisikan sumber daya ini sebagai modal finansial, dan mobilitas di sini adalah mobilitas barang dan jasa.

Kita juga bisa mendefinisikan mobilitas itu sebagai mobilitas manusia. Jadi pekerja itu bisa dengan mudah mencari kerja di negara lain. Dengan gaji yang lebih besar.

Sebenarnya kalau kita bicara tentang hal-hal yang ideal, menyangkut mobilitas manusia, seandainya di dunia ini tidak ada batas-batas negara, tidak ada batas-batas keimigrasian, artinya orang bisa dengan mudah masuk Malaysia, misalnya, dan mencari pekerjaan di sana. Orang Meksiko dapat dengan mudah mencari pekerjaan di A.S. tanpa perlu dikejar-kejar petugas imigrasi.

Tapi masalahnya kita belum hidup di dunia yang ideal seperti itu. Masih ada petugas imigrasi yang mengejar-ngejar para imigran. Memang kita belum mencapai tahap seperti itu. Tapi kalau kita melihat lebih dekat tentang pergerakan bebas manusia, banyak orang melihat bahwa ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan di dunia.

Itu pertama. Kedua, dunia ideal di mana manusia bisa bebas bergerak kan belum tercapai, yang sudah kita lihat adalah pergerakan barang dan jasa, melalui impor dan ekspor.

Kalau kita bicara pekerja, dalam ekonomi itu kan ada konsep permintaan turunan.

HB:

Apa itu maksudnya?

Ape:

Permintaan terhadap tenaga kerja itu kan ditentukan oleh permintaan terhadap produk. Misalnya, permintaan terhadap TV, itu akan memunculkan permintaan akan pekerja TV. Nah, di sinilah globalisasi, melalui ekspor dan impor, bisa memunculkan peningkatan dalam permintaan akan produk-produk tertentu, dan akhirnya juga akan meningkatkan permintaan akan tenaga kerja.

Dan ini sebenarnya yang kita lihat di Indonesia. Ketika kita mengalami boom ekspor manufaktur, non-migas, permintaan tenaga kerja menjadi meningkat. Pada tahun 1980-an itu sangat terlihat dalam statistik. Partisipasi tenaga kerja meningkat, permintaan meningkat, upah juga meningkat, sebelum itu semua terhenti oleh krisis.

HB:

Jadi menurut anda itu pada umumnya baik, ya. Masalahnya begini, menurut sebagian orang, meskipun ada *free flow of labor*, dari negara miskin yang bisa diberikan hanya untuk pekerjaan-pekerjaan rendah, sementara yang masuk ke negeri kita adalah pekerja-pekerja canggih yang gajinya besar sekali.

Bagaimana anda melihat kritik semacam ini?

Ape:

Ok. Sekarang kita andaikan bahwa yang masuk ke kita hanya para ekspatriat yang gajinya tinggi, tapi kita juga harus lihat *counter-factual*-nya, misalnya tidak ada free flow

of labor, orang-orang miskin di Jawa kan juga masih tetap di sana, tidak dapat pekerjaan.

Artinya, kita jangan hanya melihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Tapi kita juga harus melihat tenaga kerja yang pergi itu. Bagaimana dia bisa meningkatkan taraf hidupnya.

Jadi kita jangan melihat masalahnya secara simplifikasi seperti itu.

HB:

Apakah anda mengakui bahwa kritik itu benar dalam sebagian hal. Artinya yang kita ekspor ke negeri-negeri maju itu hanya buruh rendahan. Tapi masalahnya kalau ini tidak terjadi, buruh-buruh ini tetap tidak dapat pekerjaan. Jadi pada dasarnya anda setuju dengan itu?

Ape:

Masalahnya sebenarnya kan bukan kita mengimpor apa dan mengekspor apa. Yang lebih penting adalah bagaimana dengan kedua hal ini taraf hidup itu meningkat. Ini yang harus kita lihat sebenarnya.

HB:

Hal-hal lain, tadi sudah saya singgung, globalisasi dikritik hanya memiskinkan kaum buruh. Kalau ada modal besar, biasanya untuk memaksimalkan keuntungan, yang dikorbankan adalah hak-hak kaum buruh.

Misalnya masalah kontrak, kontrak yang terus diperpanjang, yang justru mengorbankan hak-hak kaum buruh. Ini kata para aktivis perburuhan. Apa benar seperti itu.

Ape:

Masalahnya memang agak kompleks. Tapi problemnya begini. Ada atau tidak ada globalisasi, eksploitasi terhadap pekerja itu kan selalu mungkin terjadi. Kalau kita tertutup sekalipun, bukan berarti perusahaan domestik itu tidak akan mengeksploitasi kaum pekerja. Bahkan kalau semua dinasionalisasi, bukan berarti BUMN itu tidak akan mengeksploitasi tenaga kerja. Jadi melihatnya harus seperti itu.

Nah, memang sekarang banyak kalangan menghubungkan globalisasi itu dengan tuntutan maksimalisasi keuntungan, yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu selalu mengambil surplus yang sebesar mungkin, yang sebenarnya adalah hak kaum

pekerja.

Itu kita mulai masuk dalam tataran kebijakan dan regulasi perburuhan. Ini argumen yang universal. Globalisasi memang harus diimbangi dengan *social protection*. Ini untuk mengurangi kemungkinan bahwa hak-hak dasar buruh itu terabaikan.

Saya ingin komentar tentang tenaga kerja kontrak. Saya setuju bahwa ini adalah problem. Regulasi yang ada sekarang, tenaga kerja kontrak itu hanya 3 tahun, setelah itu harus dijadikan permanen.

Pertanyaannya adalah mengapa fenomena tenaga kerja kontrak ini menjadi marak? Jangan-jangan ini justru buah dari kebijakan yang ingin sekali memproteksi tenaga kerja. Dengan adanya regulasi yang terlalu mengikat, terlalu menekan pengusaha, maka para pengusaha menjadi enggan mempekerjakan buruh. Jadi jangan-jangan ini justru buah yang tak terelakkan dari kebijakan yang ingin sekali memproteksi tenaga kerja itu sendiri.

HB:

Mengapa para pengusaha itu memilih kontrak?

Ape:

Karena kalau kontrak, misalnya tidak lagi dibutuhkan, itu tenaga kerjanya bisa tinggal diberhentikan. Kalau pekerja permanen kan istilahnya dipecat, dan kalau dipecat itu harus memberikan pesangon, dan pesangon itu sekian kali gaji, dan ini memberatkan sekali.

Jadi ini memang problem, tapi jangan-jangan ini justru buah dari kebijakan yang ingin sekali memproteksi buruh itu sendiri.

HB:

Pukulan balik itu ya?

Ape:

Ya, pukulan balik.

HB:

Lalu ini situasinya seperti buntu. Apa yang harus dilakukan?

Ape:

Yang harus dilakukan adalah duduk bersama, buruh, pengusaha dan pemerintah, dan melihat masalahnya sebenarnya apa. Proteksi bagi orang yang berprofesi sebagai pekerja itu perlu, tapi kalau berlebihan itu malah akan menjadi pukulan balik, seperti yang anda katakan tadi.

Intinya adalah bagaimana semua kepentingan ini terjembatani. Pemerintah diperlukan sebagai mediator. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan pemerintah justru membuat problem semakin panjang.

HB:

Begitu?

Ape:

Ya. Karena kalau pekerja dan buruh itu diberi kesempatan untuk bicara sendiri, mereka akan menemukan cara-cara untuk menyelesaikan persoalan sendiri.

HB:

Artinya mereka bicara sendiri tanpa mediasi pemerintah?

Ape:

Ya. Atau pemerintah masuk kalau dibutuhkan saja. Kalau pemerintah masuk, di sana kan juga akan ada kepentingan pemerintah. Misalnya, menterinya ingin terlihat populis-lah, aparat pemerintah ingin terlihat jadi pahlawan, itu justru yang memunculkan masalah.

HB:

Ok. Nanti kita akan lanjutkan. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar.

HB:

Selamat pagi lagi, saudara-saudara. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Ari Perdana. Tadi dia sudah menjelaskan banyak hal. Terakhir dia bicara tentang UU buruh kita yang bermasalah. Dia juga bicara tentang pemerintah yang justru sering malah memperkeruh suasana. Bukannya menyelesaikan masalah antara buruh dan penguasaha, pemerintah justru sering menambah masalah karena terlalu ingin berkesan memihak rakyat.

Kita tahu bahwa penyelesaian apa pun harus *win-win*.

Ok, sekarang saya mau masuk ke perspektif yang lain. Ini hot issue di seluruh dunia. Sekarang ini Cina dan India merupakan hot issue dalam hal buruh. Di Cina baru-baru ini dibuka sentral riset Microsoft. Ini adalah terbesar di dunia, di luar di negerinya sendiri. Dan dia menyerap bisa lebih 55.000 tenaga kerja. Boeing buka di India. IBM juga buka di Cina.

Nah, pertanyaannya, perusahaan-perusahaan besar itu kan bukan hanya menyerap tenaga kerja, tapi juga ahli-ahli tinggi, juga memberikan *knowledge*, dan itu semua adalah orang-orang lokal. Bahkan di puncaknya kadang orang lokal.

Pertanyaannya, kenapa modal besar dengan teknologi tinggi seperti itu tidak kunjung masuk ke negeri kita. Yang masuk cuma elektronik kecil-kecilan, atau tekstil dari India.

Ape:

Ada beberapa aspek yang menarik dilihat di sini. Pertama, antara modal dan tenaga kerja itu tidak selalu harus bertentangan. Investasi, modal, itu justru akan memunculkan lapangan kerja.

HB:

Itu hukum besinya lah ya.

Ape:

Ya, itu hukum besinya. Kalau kita tolak modal, karena segala macam, itu argumen yang keliru juga.

Kedua, kenapa mereka masuknya ke dua negara itu? Padahal secara komposisi, kita juga negara yang banyak penduduk. Seperti industri-industri lain, yang dilihat pertama adalah harga buruh. Upah yang mudah. Itu yang dicari.

Banyak yang gak setuju bahwa upah yang murah itu menjadi daya tarik. Tapi faktanya upah yang murah itu memang menjadi daya tarik. Kenapa banyak yang memilih India, Viet Nam dan Cina, itu kita harus melihat apakah tingkat upah kita itu kompetitif.

Selain upah memang ada variabel kedua, yaitu produktivitas. Jangan-jangan dengan tingkat upah yang kita miliki sekarang, produktivitas kita kalah dengan Cina dan India. Ini yang masih saya cari jawabannya, Bung Hamid. India memang punya sejarah institusi pendidikan yang kuat. Sehingga ketika industri IT itu masuk, mereka siap.

Dalam industri lain, seperti manufaktur dan tekstil, di negara kita kita lihat fenomena bahwa industri yang sudah ada malah henggang.

HB:

Ya, ada Sony, Nike yang keluar.

Ape:

Ya. Sejumlah pabrik sepatu keluar. Dari segi upah buruh sebenarnya tidak ada masalah. Produktivitas juga tidak begitu kalah. Keluhan dari para pengusaha sebenarnya lebih pada iklim regulasinya. Terlalu banyak dan terlalu mengikat. Kalau buruh dipecat karena alasan rasionalisasi tenaga kerja, harus ada pesangon yang tinggi. Juga karena pelanggaran aturan perusahaan.

HB:

Katanya sampai 36 kali gaji.

Ape:

Ini sampai sekian kali gaji. Pokoknya besar. Saya lupa angkanya yang pasti. Artinya ini kan sinyal yang buruk. Ini insentif yang salah. Juga ada aturan regulasi lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan perburuhan. Hal-hal semacam itu yang membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Dan akhirnya pilihan perusahaan-perusahaan itu adalah ke luar dari Indonesia.

Dan kita lihat, ketika perusahaan-perusahaan asing itu ke luar, yang paling terpukul akhirnya buruh juga. Ok, ada argumen bahwa globalisasi itu merugikan buruh. Tapi ketika terjadi deglobalisasi, justru itu lebih merugikan kaum buruh.

HB:

Saya kadang menganggap bahwa para pejabat kita, juga sebagian masyarakat, itu menganggap bahwa negeri ini begitu eloknya, begitu menggiurkannya, sehingga tentu banyak perusahaan besar yang ingin masuk ke negeri kita. Apakah perasaan bahwa posisi tawar kita lebih tinggi dari mereka ini justru yang memunculkan masalah.

Ape:

Bisa ya, bisa tidak. Kesan itu bisa betul dalam arti tantangan itu berubah. 10 atau 5 tahun yang lalu Cina mungkin bukan tantangan yang signifikan bagi kita. India juga demikian. Tapi ketika zaman berubah, mereka ternyata memberi tawaran yang lebih banyak dibanding Indonesia.

Pola pikir kita seharusnya juga berubah bersama dengan waktu. Bagaimana regulasi bisa lebih bersahabat. Bagaimana investasi dalam negeri tidak terbengkalai. Itu adalah jawaban normatif dari kondisi yang kita hadapi.

HB:

Saya itu bermimpi Microsoft atau perusahaan besar yang lain itu memiliki laboratorium yang besar sekali di Cikarang, misalnya, atau Bandung. Sehingga ITB juga bisa bekerja sama. Itu kan efeknya besar sekali. Buruh terserap, mahasiswa kita tambah maju, mahasiswa fisika kita maju, dsb.

Sebenarnya tren ke arah sana kan sudah dimulai, dengan masuknya industri mobil. Itu kan canggih ya. Nah, kenapa ini semua tidak terus berjalan. Saya secara awam kan membayangkan bahwa ini tentu berlanjut ke industri Helikopter, dll. Sekarang ternyata berhenti.

Ape:

Nah, kalau untuk mobil memang ini kasus yang klasik. Dalam literatur ekonomi ada istilah *infant industry*, industri bayi. Dulu kita beri proteksi yang besar, sehingga ada ruang bagi pengusaha otomotif dalam negeri untuk bersaing. Tapi masalahnya dalam industri mobil bayinya itu 30 sampai 40 tahun. Sudah 30 tahun masih dianggap bayi.

Jadi proteksi itu diberikan terlalu lama, sehingga dalam 30 tahun itu industri kita itu terbuai dengan tidak adanya kompetisi. Ini menyebabkan insentif untuk membuat kreasi atau temuan baru itu tidak ada. Ini adalah problem. Proteksi yang diberikan ternyata membuai.

HB:

Jadi anda ingin bilang bahwa harus hati-hati dengan pretensi-pretensi untuk memberi proteksi.

Ape:

Ya. Karena di balik semua itu pasti ada trade-off nya.

HB:

Trade-off itu kayaknya tidak diperhitungkan ya.

Ape:

Ya. Sayangnya seperti itu. Saya setuju perlindungan terhadap tenaga kerja. Tapi perlindungan yang berlebihan itu justru akan merugikan tenaga kerja itu sendiri.

Kalau kita bicara tentang tenaga kerja, kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang ada di pasar tenaga kerja, sudah menjadi labor, tapi ada juga orang-orang yang di luar pasar kerja tapi mencari pekerjaan.

HB:

Itu juga harus diperhitungkan ya.

Ape:

Itu harus diperhitungkan. Kita harus melihat kemiskinan, kesejahteraan. Kita tidak hanya bicara tenaga kerja. Kalau saya terlalu dilindungi, rekan-rekan saya yang masih menunggu untuk mendapatkan kerja, tidak bisa masuk. Ini perlu diperhitungkan. Kenapa pengangguran tinggi, kesejahteraan menurun, ini salah satunya karena akses terhadap lapangan dan pasar kerja semakin tertutup.

HB:

Itu karena buruh terlalu diproteksi ya.

Ape:

Ya. Sehingga lapangan kerja tertutup.

HB:

Baik Bung Ape, menarik sekali. Tapi sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.